

Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh

Helma Yuniaty

Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi

yuniati_helma@gmail.com

Anne Putri

Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi
Jalan Veteran No.79, Jirek Puhun Tembok, Kota Bukittinggi

anne_kop10@yahoo.com

Article's History:

Received 15 Agustus 2023; Received in revised form 27 Agustus 2023; Accepted 10 September 2023; Published 1 Oktober 2023. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Yuniati, H., & Putri, A. (2023). Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 9 (5). 1886-1899. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i5.1498>

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer. Populasi pada penelitian ini adalah pengelola keuangan SKPD yang terdiri dari Pejabat Pengelola Keuangan SKPD (PPK_SKPD), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan bendahara pengeluaran pada 31 OPD pada Pemerintah Kota Payakumbuh dimana seluruh anggota populasi berjumlah 93 dijadikan sampel penelitian. Metode penggumpulan data menggunakan kuesioner. Data diolah dengan menggunakan *analisis Structural Equation Modeling (SEM)* dan pengujian SEM ini menggunakan *aplikasi SmartPLS*. Hasil uji hipotesis penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, sedangkan pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Kata Kunci: Perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, lingkungan birokrasi, penyerapan anggaran

JEL Classification: L90, L91, L96

Pendahuluan

Penyerapan anggaran merupakan rencana sistematis yang berisikan tentang keseluruhan Aktivitas dan kegiatan yang berlaku dalam waktu tertentu untuk selanjutnya diwujudkan secara nyata Mardiasmo (2009). Secara garis besar penyerapan anggaran yang dimaksud adalah pencapaian dari suatu estimasi yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu Iqbal (2018).

Anggaran yang tidak terserap sesuai dengan target yang telah ditetapkan mengakibatkan terlambatnya atau tidak bisa disalurkan ke masyarakat dan tidak terdistribusikan ke sistem perekonomian yang berdampak pada masyarakat sebagai penerima mamfaat dari anggaran tersebut BPKP (2011). Terdapat dua sudut pandang terkait rendahnya penyerapan anggaran, yang pertama yaitu jumlah realisasi anggaran pada akhir tahun diperbandingkan

dengan jumlah anggarannya dan yang kedua dari segi ketidakproporsionalan serapannya Halim (2014). Kondisi penyerapan anggaran yang rendah memperlihatkan adanya permasalahan yang serius dikalangan pengguna anggaran yang selalu saja terulang setiap tahun, apabila dikaji lebih runut belanja pemerintah memang selalu melonjak drastis dipertengahan sampai akhir triwulan ketiga tahun anggaran. Kecendrungannya dimana pada empat bulan akan berakhir tahun anggaran terjadi lonjakan yang sangat signifikan Anfujatin (2016).

Kendala yang umum dan sangat sering dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam hal anggaran adalah tidak tercapainya target dalam penyerapan anggaran. Dimana penyebab utamanya adalah tidak terserapnya anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan diawal dengan kondisi penyerapan anggaran ditriwulan pertama atau triwulan I penyerapan anggarannya sangat rendah sekali sedangkan di triwulan IV terjadi peningkatan yang sangat tinggi. Kondisi ideal untuk penyerapan anggaran pemerintah daerah adalah terserap secara merata disetiap triwulannya yakni sebesar 25% (dua puluh lima persen) sehingga pada periode triwulan IV pemerintah daerah tidak menghadapi kendala dalam penyerapan anggarannya. Permasalahan penyerapan anggaran ini juga dialami oleh Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1 Dibawah ini

Tabel 1. Persentase Penyerapan Anggaran Kota Payakumbuh Tahun 2018 - 2022

Triwulan	Tahun					Rata-rata kumulatif	Rata-rata penyerapan
	2018	2019	2020	2021	2022		
I	10,35	10,50	13,13	11,29	11,44	11,34	11,34
II	29,59	29,02	38,80	32,74	33,23	32,68	21,33
III	52,62	50,28	60,31	56,31	58,24	55,55	22,88
IV	90,13	91,96	93,60	90,70	90,05	91,29	35,74

Sumber : Data Diolah

Dari Tabel diatas terlihat bahwa dari tahun anggaran 2018-2022 adanya penyerapan anggaran yang menumpuk pada triwulan IV yang ditunjukkan oleh besarnya realisasi penyerapan anggaran dibandingkan dengan triwulan-triwulan lainnya. Pada triwulan I penyerapan anggaran dari tahun 2018 – 2022 rata-rata penyerapan anggarannya sangat rendah yakni 11,34%, pada triwulan II rata-rata penyerapan anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh sebesar 21,33%, pada triwulan III rata-rata sebesar 22,88% dan pada triwulan IV rata-rata sebesar 35,74% hal ini dapat diartikan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh menumpuk pada akhir tahun anggaran.

Dari gambaran umum bisa diartikan bahwa penyerapan anggaran Pemerintah Kota Payakumbuh pada awal triwulan I sampai Triwulan III mengalami permasalahan yang sama dari tahun ke tahun. Keterlambatan penyerapan Anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh diketahui disebabkan oleh masih kurang maksimalnya perencanaan anggaran oleh SKPD hal ini disebabkan dalam menyusun program dan sub programnya SKPD pada Pemerintah Kota Payakumbuh memiliki kebiasaan yang sangat sulit dihilangkan yakni meniru rekening anggaran yang ada pada ABPD tahun sebelumnya dengan tidak memperhatikan relevansinya dengan satuan harga tahun berikutnya serta banyaknya SKPD yang membuat perencanaan anggaran yang tidak sesuai dengan kode rekening belanja yang seharusnya sehingga membuat SKPD harus menunggu perubahan anggaran untuk pencairan belanjanya, kendala selanjutnya yakni SKPD teknis yang menerima dana transfer khusus dari pemerintah pusat dimana adanya regulasi baru yang memerlukan penyesuaian kembali anggaran yang telah ditetapkan sehingga dibutuh pergeseran anggaran seperti pada Dinas Pendidikan, Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum sehingga SKPD dimaksud tidak bisa segera merealisasikan belanja sesuai dengan APBD yang telah ada. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Warongan (2017) bahwa perencanaan anggaran yang buruk adalah hambatan yang signifikan mencegah penyerapan anggaran, adanya kontribusi yang besar dari perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran, dimana dengan adanya perencanaan anggaran yang semakin baik maka penyerapan anggaran juga akan semakin baik. Penelitian Iqbal (2018) juga menemukan bahwa semakin baik perencanaan anggaran maka tingkat penyerapan anggaran akan semakin meningkat pula. Dengan kata lain semakin matang pengelola anggaran dalam mengelola dan merencanakan, maka program dan kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai.

Fenomena yang juga sangat menghambat penyerapan anggaran di Kota Payakumbuh yakni pada saat proses pelaksanaan anggaran dimana untuk pelaksanaan anggaran, PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) melakukan penyusunan anggaran kas pemerintah daerah yang digunakan untuk mengatur ketersedian dana guna mendanai pengeluaran daerah sesuai dengan rencana yang tercantum pada DPA SKPD, anggaran kas pemerintah daerah ini sendiri dibuat sesuai dengan usulan kebutuhan SKPD namun di Kota Payakumbuh SKPD sering mengusulkan anggaran kas tanpa memperhitungkan kesesuaian dengan waktu pelaksanaan sebuah program kegiatan bahkan ada SKPD yang hanya menetapkan anggaran kasnya dengan membagi rata sebesar 12 bulan, serta ada juga SKPD yang menetapkan anggaran kasnya pada bulan terakhir pada tiap triwulan anggaran. Hal ini menyulitkan SKPD untuk merealisasikan anggarannya, kemudian adanya ketidak taatan PPTK dalam merealisasikan belanjanya yang menimbulkan tidak diakuiannya belanja tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2015) bahwa faktor pelaksanaan anggaran sangat berpengaruh terhadap penyerapan anggaran semakin baik pelaksanaan anggaran yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintah Kota Banda Aceh, maka akan semakin baik pula serapan anggaran Satker nya. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD cukup baik, namun pelaksanaan program dan kegiatan belum dilakukan tepat waktu sesuai dengan perencanaan anggaran kas.

Lingkungan birokrasi yang sehat juga membuat penyerapan anggaran menjadi lancar dan mudah, lingkungan birokrasi di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh sudah cukup baik namun masih adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi serta adanya gesekan-gesekan antar inividu yang menyebab terlambatnya penyerapan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Furqana & Handayani (2022) menyatakan bahwa lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Disaat lingkungan birokrasi tidak mampu menompang kegiatan organisasi maka akan menahan kinerja organisasi. Dengan adanya permasalahan yang terjadi pada Pemerintah Kota Payakumbuh dalam penyerapan anggaran maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran pemerintah daerah kota payakumbuh.

Tinjauan Kepustakaan

Penerapan Anggaran

Penyerapan anggaran adalah satu tahapan dari siklus anggaran yang dimulai dari perencanaan anggaran, penetapan anggaran serta pengesahan anggaran oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), penyerapan anggaran, pengawasan anggaran dan pertanggungjawaban penyerapan anggaran. Tahapan penyerapan anggaran ini dimulai pada saat Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disahkan oleh DPRD. Agar terjadinya kesatuan pemahaman serta kesatuan langkah dalam pelaksanaan anggaran maka pemerintah daerah sebagai pelaksana dari Peraturan daerah tentang APBD selanjutnya menerbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan APBD sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan APBD. Kinerja manajer publik akan dinilai sesuai dengan pencapaian target anggaran, seberapa tinggi serapan yang berhasil dicapai. Penilaian kinerja dilakukan untuk menganalisis simpangan kinerja aktual dengan yang dianggarkan Mardiasmo (2009).

Menurut Halim (2014) Penyerapan Anggaran adalah ukuran dari pencapaian suatu estimasi target selama periode waktu tertentu yang dipandang pada suatu saat tertentu. Penyerapan anggaran dilaksanakan dengan pencairan dana satuan kerja yang bisa dinilai dari tinggi atau rendahnya jumlah anggaran yang telah dicairkan atau direalisasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam satu tahun anggaran. Indikator pengukuran penyerapan anggaran menurut Iqbal (2018) adalah dengan melihat perbandingan realisasi dengan target realisasi, realisasi per-triwulan dan Konsistensi pelaksanaan (kegiatan dan waktu).

Perencanaan Anggaran

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konteks keuangan daerah, prosedur penganggaran dan penetapan anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam perencanaan. Tahapan perencanaan dalam sebuah organisasi sangat penting tidak terkecuali pada organisasi sektor publik karena dipandang sebagai faktor penentu keberhasilan

pencapaian kinerja yang ditunjukkan dengan tingginya penyerapan anggaran. Proses perencanaan pada anggaran merupakan tahap awal untuk mengalokasikan sumber daya atau anggaran yang dimiliki Purwati (2021).

Perencanaan (planning) merupakan proses yang diawali dengan penetapan tujuan organisasi berupa penentuan strategi untuk pencapaian tujuan secara menyeluruh serta perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga tercapainya tujuan tersebut Iqbal (2018). Pengukuran untuk perencanaan anggaran dengan menggunakan indikator kesesuaian dengan kebutuhan, kesesuaian dengan aturan, mudah dipahami, kesalahan administrasi, ketepatan waktu, partisipatif. Iqbal, (2018)

Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan BPKP (2011). Pelaksanaan anggaran merupakan aktivitas yang dilaksanakan, yang terkait dengan penggunaan anggaran. Menurut Purwati (2021) dalam pelaksanaan anggaran kerap kali terjadi kendala-kendala yang mengakibatkan suatu program/kegiatan tidak dapat dilakukan sesuai jadwal atau rencana awal sehingga mempengaruhi realisasi anggaran yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Ini menyebabkan pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh anggaran akan mundur waktu pelaksanaannya dan otomatis akan memundurkan waktu penyerapan anggaran. Anton (2017) mengukur pelaksanaan anggaran dengan indikator persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal Satker, pengadaan barang dan jasa serta mekanisme pembayaran

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Simanjuntak (2016) menyatakan bahwa sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. Pelaku dan sifatnya dilakukan oleh keturunan dan lingkungannya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia terdiri dari daya pikir dan daya fisik setiap manusia. Tegasnya kemampuan setiap manusia ditentukan oleh daya pikir dan daya fisiknya. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Peralatan yang handal atau canggih tanpa peran aktif sumber daya manusia tidak berarti apa-apa. Daya pikir adalah kecerdasan yang dibawa sejak lahir (modal dasar), sedangkan kecakapan diperoleh dari usaha (belajar dan pelatihan). Kecerdasan tolok ukurnya adalah Intelligence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ). Kompetensi sumber daya manusia bisa diukur dengan melihat kemampuan, keterampilan, perilaku, jenjang pendidikan serta pengalaman yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut Simanjuntak (2016), Harsono (2011), Kennedy (2020). Sedangkan Iqbal (2018) mengukur kapasitas sumber daya manusia dari knowledge, skill dan attitude.

Lingkungan Birokrasi

Birokrasi dipandang sebagai sebuah lambang rasionalitas dan implementasi yang efisien dari tujuan dan penyediaan layanan. Lingkungan birokrasi disini yang dimaksud adalah lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Lingkungan internal memberikan dampak yang terjadi dalam organisasi tersebut seperti hubungan antar karyawan, sosialisasi dan pengendalian internal organisasi. Kondisi internal organisasi ini dapat berganti dan berkembang tentunya di masa depan. Sedangkan lingkungan eksternal lebih berfokus kepada kondisi yang terjadi di luar organisasi yang diantaranya adalah pihak luar yang bekerjasama, kebijakan negara, pembaruan teknologi dan masyarakat Iksan (2020). Menurut Elim (2018) Kondisi atau keadaan yang ada pada pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi berjalan lancar atau tidak kegiatan mereka. Birokrasi merupakan alat atau mekanisme yang dibuat untuk kesuksesan dan efisiensi suatu pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Lingkungan birokrasi yang baik akan membuat pelaksanaan kegiatan operasional menjadi lancar. Namun jika lingkungan birokrasi tidak mendukung kegiatan organisasi maka akan menghambat kinerja organisasi. Lingkungan birokrasi, diukur dengan indikator lingkungan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara pengelola pengadaan dan pengelola keuangan, proses pencairan anggaran Purwati (2021) sedangkan pada penelitian ini lingkungan birokrasi hanya diukur dengan indikator lingkungan kerja, hubungan antara atasan dan bawahan serta hubungan antara pengelola pengadaan dan pengelola keuangan.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.

Penelitian yang dilakukan oleh Aldita & Muniruddin (2018) menunjukkan bahwa perencanaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syahwildan & Irma (2022) juga menunjukkan bahwa Perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.\

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran.

Menurut Syahwildan & Irma (2022) Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Purwati (2021) dimana penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran, artinya bahwa semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik pula penyerapan anggaran.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran.

Penelitian Syahwildan & Irma (2022) Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Malahayati (2015) dimana kapasitas SDM berpengaruh positif baik secara parsial dan simultan terhadap serapan anggaran SKPD. Semakin baik kapasitas SDM yang berada di SKPD, maka akan semakin baik serapan anggaran SKPD tersebut. Oleh karena itu peningkatan kapasitas SDM perlu dilakukan karena akan mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan yang berdampak terhadap penyerapan anggaran SKPD.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran.

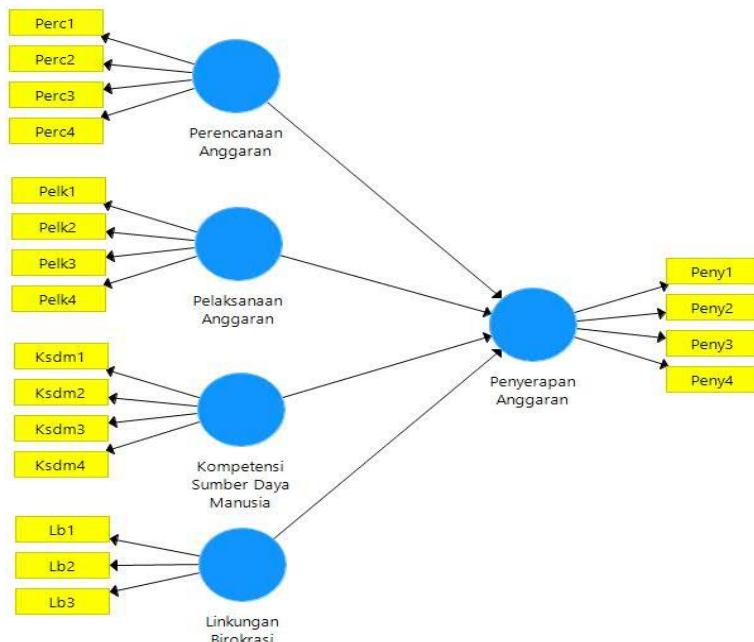
Penelitian Furqana & Handayani (2022) terdapat pengaruh positif dan signifikan lingkungan birokrasi terhadap penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Tanah Datar. Hal ini menunjukkan bahwa baik atau buruknya lingkungan birokrasi akan mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran. Semakin baik lingkungan birokrasi akan semakin mempermudah SKPD Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada sehingga diharapkan serapan anggaran dapat cepat dilaksanakan. Penelitian yang dilakukan oleh Aldita & Muniruddin (2018) dimana kondisi lingkungan birokrasi yang ada di SKPD Kota Langsa berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran.

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Kota Payakumbuh dengan populasi sebanyak 31 SKPD dengan Responden penelitian ini adalah Pejabat Pengelola Keuangan (PPK-SKPD), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran. Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 93 orang (3 orang per SKPD) yang terdiri dari 1 (satu orang) PPK-SKPD, 1 (satu) orang PPTK dan 1 (satu) orang bendahara pengeluaran. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan statistik inferensial diukur dengan menggunakan software SmartPLS mulai dari pengukuran model (outer model), struktur model (inner model) dan pengujian hipotesis Ghazali (2015). Tahapan pengujian dilakukan dengan:

1. Model Pengukuran (Outer Model)
Evaluasi outer model disebut pula dengan evaluasi model pengukuran dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model. Outer model dengan indikator refleksif dievaluasi melalui convergent validity dan discriminant validity untuk indikator pembentuk konstruk laten, serta melalui composite reliability dan Cronbach alpha untuk blok indikatornya Ghazali (2011)
2. Model Struktural (Inner Model)
Pada model struktural, yang disebut juga sebagai model bagian dalam (inner model) dimana semua variabel laten dihubungkan satu dengan yang lain dengan didasarkan pada teori substansi. Variabel laten adalah suatu konstruk dalam model persamaan struktural yang tidak dapat diukur secara langsung (unobserved variable). Variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu eksogen dan endogen. Pengujian inner model atau model struktural

dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk atau variabel laten, yang dilihat dari nilai R-square dari model penelitian dan juga dengan melihat besar koefisien jalur strukturalnya. Diagram path untuk model persamaan struktural digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Jalur Model

3. Model Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik untuk menunjukkan tingkat signifikansi. Untuk pengujian hipotesis menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96 melalui proses bootstrapping. Kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah:

1. Jika $\text{Sig} > 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} < t_{\text{Tabel}}$ maka H_0 diterima atau H_1 ditolak.
2. Jika $\text{Sig} < 0,05$ dan $t_{\text{hitung}} > t_{\text{Tabel}}$ maka H_0 ditolak atau H_1 diterima.

Hasil Dan Pembahasan

A. Uji Outer Model (Measurement Model)

Sebelum dilakukan pengukuran, perlu dilakukan pengujian kelayakan data dengan mengukur validitas dan reliabilitas variabel. Uji outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reliabilitas model yang hasilnya dijelaskan dibawah ini:

1. Validitas Konvergen (Convergent Validity)

Pada penelitian ini validitas konvergen dibuktikan melalui pencapaian kriteria. Dalam pendekatan SEM-PLS, sebuah pengukuran telah memenuhi validitas konvergen apabila telah memenuhi syarat yaitu memiliki loading faktor minimal 0,5. Hasil loading faktor dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Outer Loading

Matrik	Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Lingkungan Birokrasi	Penyerapan Anggaran
Perc1	0.733				
Perc2	0.629				
Perc3	0.789				
Perc4	0.821				
Pelk2		0.842			
Pelk4		0.823			
Ksdm1			0.888		
Ksdm4			0.858		
Lb2				0.831	
Lb3				0.723	
Peny1					0.632
Peny2					0.795
Peny3					0.830
Peny4					0.807

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 2 diatas dapat disimpulkan bahwa semua indikator mempunyai faktor loading lebih besar dari 0,5. Hasil ini menunjukkan bahwa semua indikator telah memiliki validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, indikator valid dalam mengukur masing-masing variabel latennya.

2. Uji Diskriminan Validity

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Pada pengujian *discriminant validity* dapat dilihat menggunakan output pengujian AVE, Crossloading dan *latent variable correlation*. Berikut hasil output uji diskriminan validity:

a. AVE

Tabel 3. Discriminan Validity Variabel Laten dengan AVE

Construct Reliability and Validity				
Matrix	Cronbach' Alpha	Rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Perencanaan Anggaran	0.739	0.780	0.833	0.557
Pelaksanaan Anggaran	0.704	0.740	0.869	0.769
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.536	0.722	0.794	0.664
Lingkungan Birokrasi	0.361	0.371	0.756	0.609
Penyerapan Anggaran	0.767	0.777	0.852	0.593

Sumber: Data diolah 2023

Salah satu cara untuk melakukan pengukuran validitas diskriminan adalah dengan melihat nilai AVE (Average Variance Extracted). Dimana nilai AVE harus lebih besar 0.50, yang berarti seluruh variabel laten mempunyai validitas diskriminan yang baik. Jika nilai AVE di bawah 0.5 berarti variabel laten tidak memiliki validitas diskriminan yang baik atau variabel tidak valid. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa nilai AVE setiap variabel dalam penelitian ini lebih besar dari 0.50 ini berarti seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

b. Cross Loading

Cross loading setiap indikator harus memiliki *loading* lebih tinggi untuk setiap variabel laten yang diukur, dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya. Hasil *output* dapat dilihat pada Tabel dibawah ini. Korelasi masing-masing indikator terhadap variabelnya memiliki nilai lebih tinggi daripada korelasi indikator tersebut dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator pada setiap variabel memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

Tabel 4. Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Cross Loading

Discriminant Validity					
Cross Loadings					
Matrix	Perencanaan Anggaran	Pelaksanaan Anggaran	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Lingkungan Birokrasi	Penyerapan Anggaran
Perc1	0.733	0.315	0.344	0.291	0.456
Perc2	0.629	0.360	0.443	0.408	0.390
Perc3	0.789	0.376	0.451	0.397	0.382
Perc4	0.821	0.349	0.405	0.301	0.666
Plk2	0.461	0.911	0.400	0.371	0.481
Plk4	0.336	0.841	0.578	0.367	0.366
Ksdm1	0.395	0.494	0.676	0.466	0.232
Ksdm4	0.490	0.347	0.933	0.492	0.476
Lb2	0.430	0.562	0.481	0.831	0.346
Lb3	0.259	0.147	0.405	0.726	0.280
Peny1	0.375	0.428	0.438	0.433	0.635
Peny2	0.552	0.342	0.333	0.239	0.794
Peny3	0.567	0.361	0.334	0.329	0.829
Peny4	0.537	0.390	0.350	0.264	0.807

Sumber: Data diolah 2023

Dari hasil *cross loading* untuk diskriminan validity dapat kita lihat nilai cross loading dari indikator perencanaan anggaran (Perc1) terhadap variable perencanaan anggaran sebesar 0,733 lebih besar daripada nilai cross loading perencanaan anggaran (Perc1) dengan variable pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan penyerapan anggaran yaitu 0.315, 0.344, 0.291, 0.456. Nilai cross loading dari indikator pelaksanaan anggaran (Plk2) terhadap pelaksanaan anggaran sebesar 0,911 lebih besar daripada nilai cross loading pelaksanaan anggaran (Plk2) dengan perencanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan peyerapan anggaran yaitu sebesar 0.461, 0.400, 0.371, 0.481. Begitu juga pada indikator lainnya semua nilai cross loading indikator dengan variabelnya lebih besar daripada crossloading dengan variabel lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pada semua variabel dalam penelitian ini memiliki tingkat *discriminant validity* yang baik.

c. Latent Variabel Correlation

Uji validitas diskriminan dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh perbedaan nilai validitas suatu variabel bila dibandingkan dengan variabel lainnya. Salah satu cara untuk melakukan pengukuran validitas diskriminan adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat dari *average variance extracted* (AVE) yang diperoleh melalui nilai korelasi antar variabel (Hair *et al.*, 2011). Apabila nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) variabel laten lebih besar dari 0,7 dan lebih besar dari nilai korelasi dengan seluruh variabel laten lainnya maka dikatakan memiliki validitas diskriminan yang baik. Untuk melihat nilai akar kuadrat *average variance extracted* (AVE) variabel laten dapat dilihat pada kolom Fornell – Larcker Criterion dibawah ini:

Tabel 5. Diskriminan Validity Variabel Laten dengan Fornell - Larcker Criterion

Fornell – Larcker Criterion					
Matrix	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Lingkungan Birokrasi	Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	Perencanaan Anggaran
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.815				
Lingkungan Birokrasi	0.570	0.780			
Pelaksanaan Anggaran	0.465	0.480	0.877		
Penyerapan Anggaran	0.467	0.404	0.490	0.770	
Perencanaan Anggaran	0.540	0.451	0.462	0.465	0.747

Sumber: Data diolah 2023

Berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan nilai akar kuadrat AVE pada variabel kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.815 . Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara kompetensi sumber daya manusia dengan variabel lainnya. Nilai akar kuadrat AVE pada variabel lingkungan birokrasi sebesar 0.780. Nilai tersebut lebih besar dari nilai korelasi antara variabel laten lainnya. Dengan demikian nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari nilai korelasi antar variabel dengan variabel lainnya. Artinya bahwa seluruh variabel laten dalam penelitian ini mempunyai validitas diskriminan yang baik.

d. Composite Reliability

Kelompok Indikator yang mengukur sebuah variabel memiliki reliabilitas komposit yang baik jika memiliki reliabilitas komposit $\geq 0,7$ meskipun bukan merupakan standar absolut. Hasil reliabilitas komposit dipaparkan pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Nilai Reliabilitas Masing-Masing Variabel Penelitian

Construct Reliability and Validity				
Matrix	Cronbach' Alpha	Rho_A	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)
Perencanaan Anggaran	0.739	0.780	0.833	0.557

Pelaksanaan Anggaran	0.704	0.740	0.869	0.769
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.536	0.722	0.794	0.664
Lingkungan Birokrasi	0.361	0.371	0.756	0.609
Penyerapan Anggaran	0.767	0.777	0.852	0.593

Sumber: Data Diolah 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai reliabilitas komposit seluruh variabel laten berkisar antara 0,756 sampai dengan 0,869 artinya bahwa keseluruhan nilai reliabilitas komposit lebih besar dari 0,7. Hasil ini menunjukkan bahwa seluruh variabel laten mempunyai reliabilitas komposit yang baik

B. Uji Inner Model (Struktural Model)

Inner model merupakan model struktural untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Inner Model diukur menggunakan R-square variabel laten dependen dengan interpretasi yang sama dengan regresi; Q-Square predictive relevance untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameternya. Nilai $Q\text{-square} > 0$ menunjukkan model memiliki predictive relevance; sebaliknya jika nilai $Q\text{-Square} \leq 0$ menunjukkan model kurang memiliki predictive relevance. Menurut (Hair et al., 2014) nilai Q-square 0.35 berarti model tergolong kuat, 0,15 model tergolong sedang, dan 0,02 berarti model tergolong lemah. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan R-Square untuk konstruk dependen, nilai koefisien path atau t-value tiap path untuk tingkat nyata dalam pengujian hipotesis. Semakin tinggi nilai R-Square berarti semakin baik model prediksi dari model penelitian yang diajukan (Jogiyanto & Willy, 2014).

Inner model bertujuan untuk melihat hubungan antar konstruk laten. Pengujian model struktural (inner model) dilakukan melalui:

1. Pengujian R-square

Tabel 7. Nilai R²

R Square		
Matrix	R Square	R Square Adjustive
Penyerapan Anggaran	0.491	0.467

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil pengolahan data nilai R² yang tertera pada output di atas dapat dijelaskan bahwa variabel penyerapan anggaran dijelaskan oleh variabel perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, dan lingkungan birokrasi sebesar 0.491 atau 49,1 persen sisanya 50,9% persen lainnya dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dilihat dari ni R Square 0.491 yang bermakna bahwa penyerapan anggaran kuat.

2. Pengujian Q-Square

Tabel 8. Nilai Q-Square

Construct Crossvalidated Redundancy			
Total	SSO	SSE	$Q^2 (= 1-SSE/SSO)$
Perencanaan Anggaran	372.000	372.000	
Pelaksanaan Anggaran	186.000	186.000	

Kompetensi Sumber Daya Manusia	186.000	186.000	
Lingkungan Birokrasi	186.000	186.000	
Penyerapan Anggaran	372.000	279.526	0.249

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan Tabel diatas nilai Q-square sebesar 0.249 yang artinya perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, kompetensi sumber daya manusia, lingkungan birokrasi dan pelaksanaan anggaran dalam memprediksi penyerapan anggaran tergolong kedalam kategori sedang, yang berarti menunjukkan bahwa model memiliki predictive relevance yang baik.

C. Pengujian Hipotesis

Uji hipotesis ini merupakan analisis kausalitas yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisis kausalitas dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh yang terjadi antara variabel eksogen dengan variabel endogen. Variabel eksogen dinyatakan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel endogen jika nilai t statistik $> t$ Tabel dan nilai P-value $< \alpha$ 0.05. Hasil uji hipotesis dipaparkan pada gambar 3 dan Tabel 4.18 sebagai berikut.

Tabel 9. Hasil Path Coefficient Model Jalur

Matrik	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Perencanaan Anggaran - > Penyerapan Anggaran	0.518	0.528	0.085	6.055	0.000
Pelaksanaan Anggaran - > Penyerapan Anggaran	0.201	0.149	0.125	1.607	0.109
Kompetensi Sumber Daya Manusia- > Penyerapan Anggaran	0.076	0.072	0.113	0.675	0.500
Lingkungan Birokrasi- > Penyerapan Anggaran	0.031	0.059	0.159	0.192	0.848

Sumber: Data Diolah 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa:

- Nilai original sample sebesar 0,518 maka perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin tinggi perencanaan anggaran, maka semakin tinggi penyerapan anggaran. Nilai t statistik sebesar 6.055 lebih besar dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.000 $< \alpha$ 0.05, maka terima H_1 artinya perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran.
- Nilai original sample sebesar 0,201 maka pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin tinggi pelaksanaan anggaran, maka semakin tinggi penyerapan anggaran. Nilai t statistik sebesar 1.607 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.109 $> \alpha$ 0.05, maka tolak H_2 artinya pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh terhadap Penyerapan Anggaran.
- Nilai original sample sebesar 0,076 maka kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia, maka semakin tinggi penyerapan

anggaran. Nilai t statistik sebesar 0.675 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.500 > alpha 0.05, maka tolak H_3 artinya kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

- Nilai original sample sebesar 0,031 maka lingkungan birokrasi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran. Semakin tinggi lingkungan birokrasi, maka semakin tinggi penyerapan anggaran. Nilai t statistik sebesar 0.192 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.848 > alpha 0.05, maka tolak H_4 artinya lingkungan birokrasi tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran.

Pembahasan

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana Nilai t statistik sebesar 6.055 > 1,96 dan p-value 0.000 < alpha 0.05 dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,518, sehingga disimpulkan bahwa hipotesis pertama didukung atau diterima dimana perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aldita & Muniruddin, 2018) bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran. Kemudian hasil penelitian (Syahwildan & Damayanti, 2022) menyatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi.

Bila dilihat dari hasil TCR nilai skor tertinggi terdapat pada pernyataan 1 dimana perencanaan anggaran akan semakin baik dengan disahkannya DPA-SKPD tepat waktu, sesuai dengan perencanaan SKPD. Sedangkan untuk nilai skor terendah terdapat pada pernyataan 2 dimana dalam penyusunan anggaran, waktu yang tersedia sudah cukup sehingga data pendukung bisa lengkap. Sehingga disini bisa dikatakan bahwa perencanaan anggaran pada Perintah Kota Payakumbuh akan akan semakin baik dengan tersedianya waktu yang cukup sehingga data pendukung bisa lengkap dalam penyusunan anggaran. Berdasarkan hasil penelitian maka perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran di Pemerintah Kota Payakumbuh. Disaat perencanaan anggaran meningkat maka akan berpengaruh terhadap capaian penyerapan anggaran.

Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana Nilai t statistik sebesar 1.607 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value 0.109 > alpha 0.05 dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,201 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis kedua tidak didukung atau ditolak dimana pelaksanaan anggaran tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahwildan & Damayanti, 2022) menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Purwati et al., 2021) dimana penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran baik secara simultan dan parsial berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran artinya semakin baik pelaksanaan anggaran maka akan semakin baik juga penyerapan anggaran

Bila dilihat dari hasil TCR maka dapat informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel pelaksanaan anggaran adalah sebesar 3,7% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 74,9. Skor tertinggi pada variabel pelaksanaan anggaran terdapat pada pernyataan 4 dimana "Pengelola keuangan di Kota Payakumbuh sudah memahami tentang tata cara pembayaran barang dan jasa" sedangkan TCR terendah yakni terdapat pada pernyataan 3 dimana "adanya keharusan bersertifikat bagi panitia pengadaan barang dan jasa membuat pelelangan tidak dapat segera dilaksanakan", pada Tabel tabulasi data didapatkan bahwa skor tertinggi menyatakan setuju jika keharusan bersertifikat bagi panitia pengadaan barang dan jasa membuat pelelangan tidak dapat segera dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. Disaat Pengelola keuangan memahami tentang tata cara pembayaran barang dan jasa namun tetap tidak bisa meningkatkan penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyerapan Anggaran

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana Nilai t statistik sebesar 0.675 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value $0.500 > \alpha 0.05$ dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,076 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis ketiga tidak didukung atau ditolak dimana kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syahwildan & Damayanti, 2022) dimana kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di wilayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi. Kemudian tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Malahayati et al., 2015) dimana penelitian menunjukkan bahwa kompetensi SDM berpengaruh positif baik secara simultan maupun secara parsial terhadap penyerapan anggaran artinya semakin baik kompetensi SDM maka akan semakin baik juga penyerapan anggaran

Bila dilihat dari hasil TCR maka dapat informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel kompetensi sumber daya manusia adalah sebesar 3,7% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 70,4. Skor tertinggi terdapat pada pernyataan 2 yakni "Saya terlibat dalam pengelolaan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keilmuan yang Saya miliki" sedangkan skor terendah terdapat pada pernyataan 3 yaitu "adanya pejabat/pegawai pengelola kegiatan yang sering mengalami mutasi antar SKPD", pada Tabel tabulasi data didapatkan bahwa jawaban responden menyatakan netral terhadap adanya pejabat/pegawai pengelola kegiatan yang sering mengalami mutasi antar SKPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh. Ketika pengelola keuangan sudah memahami penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan aturan (Permendagri No.77 Tahun 2020) tetapi tidak bisa meningkatkan penyerapan anggaran pada Pemerintah Kota Payakumbuh.

Pengaruh Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran

Dilihat dari uji hipotesis yang telah dilakukan maka ditemukan bahwa lingkungan biroksi berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran, dimana Nilai t statistik sebesar 0.192 lebih kecil dari t Tabel (1,96) dan p-value $0.848 > \alpha 0.05$ dengan nilai Nilai original sample sebesar 0,031 sehingga disimpulkan bahwa hipotesis keempat tidak didukung atau ditolak dimana lingkungan birokrasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penyerapan anggaran. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Furqana & Handayani, 2022) dimana lingkungan birokrasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat penyerapan anggaran di SKPD Kabupaten Tanah Datar. Kemudian tidak sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aldita & Muniruddin, 2018) penelitian menunjukkan bahwa kondisi lingkungan birokrasi yang ada di SKPD Kota Langsa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Bila dilihat dari hasil TCR maka dapat informasi bahwa tingkat rata-rata skor variabel lingkungan birokrasi adalah sebesar 3,1% dengan tingkat capaian responden (TCR) sebesar 61,6. TCR tertinggi pada lingkungan birokrasi terdapat pada pernyataan 2 yakni "Pegawai yang terlibat pengadaan memahami dengan baik proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa" sedangkan skor terendah didapatkan pada pernyataan 1 yaitu "Koordinasi antar pegawai yang terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa tidak terjalin dengan baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran di lingkungan pemerintah Kota Payakumbuh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dari data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Pengujian hipotesis yang dilakukan membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan anggaran pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh. Semakin baik perencanaan anggaran SKPD maka akan semakin baik tingkat penyerapan anggaran. Sebaliknya semakin tidak baik perencanaan anggaran maka akan semakin rendah penyerapan anggaran. Kemudian Pengujian hipotesis pada penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Selanjutnya Pengujian hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran. Terakhir Pengujian hipotesis pada penelitian ini membuktikan bahwa lingkungan birokrasi berpengaruh positif tapi tidak signifikan terhadap penyerapan anggaran.

REFERENSI

- Abdillah, Willy, & Jogiyanto. (2015). Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Ed.1. Yogyakarta: ANDI.
- Aldita, A. F., & Muniruddin, S. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sdm, Pemahaman Atas Sistem Akuntansi, Lingkungan Birokrasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Skpd Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(1), 1.
- Anfujatin. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA, Jurnal Administrasi Publik ISSN: 0216-6496 Juni 2016, Vol. 14, No. 1*.
- Anton, A. (2017). Pengaruh persepsi perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran terhadap kinerja anggaran melalui penyerapan belanja anggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
- Furqana, S., & Handayani, D. F. (2022). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Lingkungan Birokrasi terhadap Penyerapan Anggaran: Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Tanah Datar. 4(3), 513–529.
- Ghozali, I. (2008). Structural Equation Modelling, Edisi II, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, I. (2011). "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS". Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., & Hengky, L. (2015). Konsep, Teknik, Aplikasi Menggunakan Smart PLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris. BP Undip. SemarangHarnanto. 2017. Akuntansi Biaya: Sistem Biaya Historis. Yogyakarta: BPFE.
- Hair, J., Sarstedt, M., Hopkins, L., & Kuppelwieser, V. (2014). Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) An emerging tool in business research. *European Business Review*, 26(2), 106-121.
- Halim, A. (2014). Manajemen Keuangan Sektor Publik problematika penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jakarta : Salemba Empat.
- Kennedy, K., Azlina, N., Julita, J., & Nurulita, S. (2020). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(Vol.13 No. 2 (2020)), 108–117. <https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3652>
- Nugroho, R. K., Timur, A., Indriyani, I., & Sulanjari, L. (2021). Determinan Fenomena " Year End Rush " Pada Satuan Kerja Badan Layanan Umum (Studi Pada Universitas Jenderal Soedirman). 109–120.
- Purwati, I., Arisyahidin, A., & Talkah, A. (2021). Analisis Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang Jasa Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Penyerapan Anggaran Di Kabupaten Kediri. *Otonomi*, 21(2), 244. <https://doi.org/10.32503/otonomi.v21i2.2046>
- Syahwildan, M., & Damayanti, I. (2022). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. In IKRAITH-EKONOMIKA. *Journals.Upi-Yai.Ac.Id*. <Https://Journals.Upi-Yai.Ac.Id/Index.Php/IKRAITH-EKONOMIKA/Article/Download/1734/1448>
- Syahwildan, M., & Irma, D. (2022). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. 5(1), 169–176.
- Warongan, L. S. G., Sonddaks, J. J., & D.L., J. (2017). Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daaerah (APBD) adalah untuk kurun waktu satu tahunan dan berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik . Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilaksanakan setelah proses perencana. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(1), 108–117.
- Wiansyah, D. R., & Mulyani, S. (2021). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyerapan Anggaran Belanja Daerah. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 5(2), 212–228.
- Zarinah, M., & Abdullah, S. (2016). Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten aceh Utara. *Jurnal Magister Akuntansi*, 5(1), 90–97.